

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 195/PMK.010/2016
 TENTANG : PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG
 PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI
 PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG
 DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR
 MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN
 2016

- A. RINCIAN DAFTAR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA NON POKOK YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITERIMA TAHUN 2015

NO	PDAM	
	NAMA	NPWP
1	PDAM Kota Gorontalo	01.493.360.0-822.000
2	PDAM Kabupaten Kupang	01.470.769.9-922.000
3	PDAM Kabupaten Pamekasan	01.297.826.8-608.000
4	PDAM Kabupaten Jember	01.144.641.6-651.000
5	PDAM Kabupaten Cilacap	01.491.303.2-522.000
6	PDAM Kabupaten Madiun	01.498.450.4-621.000
7	PDAM Kabupaten Bojonegoro	01.234.909.8-601.000
8	PDAM Kabupaten Gianyar	01.413.292.2-404.000
9	PDAM Kota Pekalongan	01.407.021.0-502.000
10	PDAM Kota Tebing Tinggi	01.437.026.6-114.000
11	PDAM Kabupaten Purwakarta	01.437.884.8-409.000
12	PDAM Kabupaten Karawang	01.438.261.8-408.000
13	PDAM Kabupaten Klungkung	01.466.302.1-904.000
14	PDAM Kabupaten Bangkalan	01.535.175.2-644.000
15	PDAM Kabupaten Purbalingga	01.245.062.3-529.000
16	PDAM Kabupaten Magetan	01.464.507.3-646.001
17	PDAM Kabupaten Karangasem	01.413.299.7-904.000
18	PDAM Kabupaten Blora	01.558.003.8-514.000
19	PDAM Kabupaten Sukabumi	01.450.982.2-405.000
20	PDAM Kota Sibolga	01.135.214.3-126.000
21	PDAM Kota Sawahlunto	01.268.630.9-203.000
22	PDAM Kabupaten Gowa	01.412.769.0-807.000
23	PDAM Kota Solok	01.482.179.7-203.000
24	PDAM Kabupaten Mamuju	01.595.291.4-814.000
25	PDAM Kabupaten Pasaman	01.488.006.6-202.000
26	PDAM Kabupaten Sragen	01.515.341.4-528.000
27	PDAM Kota Padang Panjang	01.266.966.9-202.000
28	PDAM Kabupaten Mojokerto	01.438.739.3-602.000

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor : (1)
Perihal : Permohonan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah
atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara sesuai
PMK Nomor XXX/PMK.XX/2016

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (2)
di (3)

Sehubungan dengan Pasal X ayat (X) Peraturan Menteri Keuangan Nomor XX/PMK.XX/2016 tanggal XX tentang Pajak penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2016, dengan ini :

Nama Wajib Pajak : (4)
NPWP : (5)
Alamat : (6)

mengajukan permohonan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara sesuai PMK Nomor XXX/PMK.XX/2016

Untuk kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampiri :

1. SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015
2. Laporan Keuangan Tahun 2015
3. Kutipan elemen Laporan Keuangan Tahun 2015 sesuai lampiran PMK Nomor XX/PMK.XX/2016

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., 2016 (7)
Pengurus/Kuasa *),

Nama Jelas(8)

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah (9)
2. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak

*) Coret yang tidak sesuai

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK

1. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak;
2. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
3. Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
4. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
5. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak;
7. Diisi dengan nama kota, tanggal dan bulan surat;
8. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampiri surat kuasa bermeterai;
9. Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar.

C. FORMAT LEMBAR PERHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH

LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN
DITANGGUNG PEMERINTAH

Nama Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Tahun Pajak : 2015

No.	Uraian	Rupiah
I	Pendapatan Usaha (3)	
II	Beban Usaha (4)	
III	Laba (Rugi) Usaha (5)	
V	Pendapatan dari Luar Usaha	
	a. Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara) (6)	
	b. Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara (7)	
	c. Beban Lain-lain (8)	
V	Jurnal Laba (Rugi) Bersih (9)	
VI	Koreksi Fiskal (10)	
VII	Penghasilan Neto Fiskal (11)	
VIII	Kompensasi Kerugian (12)	
IX	Penghasilan Kena Pajak (13)	
X	Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara (14)	
XI	Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara (15)	
XII	Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah (Selisih X - XI) (16)	

....., 2016 (17)
 Pengurus/Kuasa *),

Nama Jelas(18)

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah (19)
2. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak

*) Coret yang tidak sesuai

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK
PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Bruto dari Usaha;
4. Diisi dengan Jumlah Beban Usaha;
5. Diisi dengan Jumlah Pengurangan (I) - (II);
6. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara);
7. Diisi dengan Jumlah Penghasilan dari Penghapusan Piutang PDAM
Berdasarkan KMK 805/KMK.05/2015 tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Atas Nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo dan 27 (Dua Puluh Tujuh) PDAM Penanggung Utang Lainnya;
8. Diisi dengan Jumlah Beban Lain-lain;
9. Diisi dengan Jumlah Laba (Rugi) Bersih (III) + (IV.a) + (IV.b) - (IV.c);
10. Diisi dengan Jumlah Koreksi Fiskal;
11. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Neto Fiskal (V) - (VI);
12. Diisi dengan Jumlah Kompensasi Kerugian;
13. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Kena Pajak (VII) - (VIII);
14. Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara;
15. Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara;
16. Diisi dengan Jumlah Pengurangan (X) - (XI);
17. Diisi dengan nama kota, tanggal dan bulan surat;
18. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampirkan surat kuasa bermeterai;
19. Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001